



The Role of Bureaucracy in the Implementation of Education Policy

Wita Noviyanti¹, Agus Alif Humaydiy², Masduki Duriyat³

Email : witanoviyanti126@gmail.com , angumay0405@gmail.com , masduki@uinssc.ac.id

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRACT

Education is a strategic sector in national development that requires the implementation of effective and well-structured policies. In this context, bureaucracy plays a vital role as the implementer, connector, and controller of policy execution from the central government to the school level. This paper aims to examine the role of bureaucracy in the implementation of education policy and analyze the challenges encountered in the process. The method used is a literature review with a qualitative descriptive approach. The findings indicate that bureaucracy is involved in program planning, resource distribution, policy implementation monitoring, and stakeholder communication. However, the implementation process still faces obstacles such as limited human resources, bureaucratic inefficiency, weak inter-agency coordination, and resistance to change at the grassroots level. To enhance the effectiveness of education policy implementation, it is necessary to strengthen bureaucratic capacity, simplify administrative procedures, and improve the accountability of education personnel. By optimizing the role of bureaucracy, the goals of national education policy can be achieved more effectively.

Keywords: Bureaucracy, Policy Implementation, Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat urgen bagi sebuah Negara. sebab pendidikan menjadi sarana utama untuk meningkatkan sumber daya manusia yang mampu mengoptimalkan potensi diri dan mampu mengelolanya secara maksimal dan bijaksana. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pendidikan nasional yaitu mewujudkan sistem pendidikan guna meningkatkan pranata sosial yang berwibawa dan kuat sehingga mampu memberdayakan masyarakat Indonesia yang berkualitas dan proaktif dalam memecahkan tantangan zaman yang berubah-ubah. Munculnya sebuah kebijakan disebabkan adanya permasalahan yang melatarbelakangi kebijakan tersebut, sehingga kebijakan sebagai pedoman atau strategi dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan krusial dalam mencapai tujuan pendidikan suatu negara. kebijakan pendidikan sendiri merupakan hasil dari keputusan pemerintah yang merumuskan rencana kegiatan dengan tujuan tertentu untuk kemajuan masyarakat melalui lembaga dan aparatur negara. Kata kebijakan berasal dari bahasa Inggris "policy" yang merujuk pada suatu rencana dalam kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, partai politik, dan lembaga terkait lainnya.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memberikan manfaat bagi banyak orang tanpa menimbulkan kerugian secara signifikan. Untuk mencapai hal ini, kebijakan dibuat berdasarkan undang-undang yang jelas dan telah melibatkan proses musyawarah dengan berbagai pihak terkait. Implementasi kebijakan pendidikan menjadi bagian integral dari proses pembuatan kebijakan, dimana tahapan penyusunan agenda, formulasi, adopsi, dan implementasi menjadi urutan waktu yang saling terkait.²

Birokrasi hadir sebenarnya dipergunakan untuk mengatur suatu pekerjaan yang beraneka ragam yang menyangkut kepentingan orang banyak agar bisa terlaksana dan melayani semua golongan dengan baik, efektif, dan mudah. Akan tetapi, dalam perkembangannya sampai sekarang birokrasi telah menjadi momok bagi manusia modern, yang selalu ingin dihindari dan dijauhi.

Dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan, birokrasi memainkan peran yang sangat penting. Birokrasi berfungsi sebagai mesin administratif yang bertugas untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam program-program konkret yang dapat dijalankan di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, bahkan sampai ke satuan pendidikan.

Efektivitas birokrasi dalam menjalankan peran ini menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterapkan dengan tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pendidikan melalui birokrasi sering kali menghadapi berbagai tantangan. Birokrasi yang lamban, prosedur administratif yang rumit, kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya praktik-praktik maladministrasi menjadi hambatan yang tidak dapat diabaikan. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang seharusnya berdampak positif terhadap dunia pendidikan justru tidak tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam peran birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan. Pemahaman yang komprehensif terhadap peran, tantangan, serta strategi penguatan birokrasi di bidang pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber referensi yang relevan seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, serta sumber-sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan birokrasi dan implementasi kebijakan pendidikan.

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai peran birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, serta untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi tersebut. Data yang dikumpulkan dianalisis secara tematik dengan menyoroti pola-pola, isu utama, serta hubungan antara konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Birokrasi

Birokrasi secara sederhana diartikan sebagai organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjalankan tugas sebagai penyedia (pelayanan) jasa kepada masyarakat. Dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta (private), maupun organisasi publik (public) termasuk organisasi pemerintahan didalamnya terdapat organ-organ yang membentuk sebuah organisasi sehingga organisasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya.



Weber melihat bahwa kinerja birokrasi bisa didekati dari teori *Social Action* (perilaku sosial). Menurut teori perilaku sosial semua aktifitas manusia digerakan oleh *meanings* (maksud- maksud dan tujuan-tujuan tertentu). Untuk mengetahui dan menjelaskan perilaku manusia maka harus terlebih dulu mengetahui maksud dan tujuan dari perilaku tersebut. Weber membedakan motif dibalik perilaku manusia yaitu *affective, traditional, value rational and instrumentally rational*. Lebih spesifik lagi, weber menyatakan bahwa birokrasi rasional adalah birokrasi yang berdasar pada aturan-aturan formal, legalistik dan bukan didasarkan pada otoritas tradisional dan kharismatik.³

Solong dan Yadi menyebutkan bahwa birokrasi adalah sistem yang digunakan untuk mengelola suatu organisasi, terutama yang besar seperti pemerintah atau perusahaan. Sistem birokrasi memiliki aturan, prosedur, serta hierarki yang jelas. Prinsip birokrasi termasuk rasionalitas, impersonalitas, hierarki yang terstruktur dengan baik, dan pembagian tugas khusus. Haning menyebutkan birokrasi membantu organisasi menjalankan pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya dengan cara yang tertib, efisien, dan konsisten. Meskipun memiliki manfaat, birokrasi kadang dianggap terlalu rumit dan lambat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan.

Dalam penelitian Munafaroh dan Masyhuri (2019) disebutkan bahwa pemahaman organisasi modern sangat dipengaruhi oleh konsep birokrasi yang didefinisikan oleh Max weber. Birokrasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem administrasi atau manajemen yang memiliki karakteristik tertentu seperti rasionalitas, impersonalitas, struktur hierarki dan pembagian tugas yang spesifik. Konsep ini dikembangkan oleh Weber pada abad ke-20 serta Weber menjelaskan prinsip-prinsipnya, yang bisa diterapkan pada berbagai jenis organisasi, seperti perusahaan, pemerintah, serta lain-lain.⁴

Dengan Konsep "ideal type of organization" Weber melukiskan sebagai badan administrasi pejabat yang diangkat. Oleh karenanya Weber lebih menegaskan ciri-ciri birokrasi sebagai berikut :

1. Adanya pembagian pekerjaan, hubungan kewenangan dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas.
2. Kantor diorganisasikan secara hierarki atau adanya rantai komando.
3. Pejabat manajerial dipilih dengan kualifikasi teknis yang ditentukan dengan pendidikan dan ujian.
4. Peraturan dan pengaturan mengarah pada pelaksanaan pekerjaan.
5. Hubungan antara manajer dengan karyawan berbentuk impersonal
6. Pegawai yang berorientasi pada karier dan mendapatkan gaji yang tepat.⁵

Prinsip-prinsip dasar birokrasi Weber merupakan dasar penting untuk memahami struktur dan manajemen organisasi di lingkungan organisasi kontemporer. elemen penting seperti rasionalitas , impersonalitas, hierarki, pembagian tugas, dan aturan tertulis tetap relevan dan dapat digunakan dalam berbagai situasi, meskipun interpretasi dan penerapan konsep ini telah berubah. Selain tetap menjadi alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan memastikan proses pengambilan keputusan yang jelas dan konsisten, memahami konsep birokrasi Weber dapat membantu organisasi mengatasi masalah dengan lebih efektif di era yang terus berubah ini.⁶

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan bagian dari formula yang erat kaitannya dengan kebijakan publik. Pendekatan implementasi kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn merupakan sebuah model pendekatan top-down yang dirumuskan. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi serta berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi

kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Edwards III, terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Setiap variabel tersebut mempunyai sub variabel yang berkaitan satu sama lainnya. Variabel komunikasi mempunyai sub variabel yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi. Variabel sumber daya mempunyai sub variabel yakni staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Variabel disposisi mempunyai sub variabel yakni efek disposisi, pengaturan birokrasi dan insentif. Variabel terakhir struktur organisasi mempunyai sub variabel yakni standar operasional prosedur dan fragmentasi.

Implementasi kebijakan merupakan bagian dalam upaya memahami kebijakan secara komprehensif. Pada dasarnya, pemahaman itu menggiring pada pemahaman mengenai implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan. Bahkan, implementasi kebijakan pendidikan seringkali berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya.

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Implementasi Kebijakan Pendidikan merupakan bagian proses untuk pembuatan kebijakan, seperti yang dinyatakan oleh Hasbullah bahwasanya didalam proses pembuatan kebijakan yang berlangsung dalam beberapa tahap pembuatan kebijakan politik dimana aktivitas politik yang sedang berlangsung dalam tahapan membuat kebijakan dan divisualkan sebagai serangkaian dari tahap yang saling mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain yang dapat diatur berdasarkan urutan waktu dan seperti penyusunan agenda, formulasi, adaptasi, dan implementasi kebijakan pendidikan mengilustrasikan secara rinci pada fase dan karakter pembuat kebijakan itu dan dimana implementasi adalah bagian yang ada didalamnya.

Tahapan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan bersentuhan dengan stakeholder pendidikan serta dapat diterima oleh masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan hal yang rumit dengan proses yang kompleks. Dalam hal ini dapat diketahui bila dalam tahapan formulasi kebijakan dilakukan dengan baik, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar dalam evaluasi mendapatkan hasil yang sesuai dengan target.

Charles O Jones memiliki tiga tahapan utama, yakni organization, interpretation, and application. pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya yang ada, unit-unit serta metode untuk menjalankan program yang sudah direncanakan. Kedua, interpretasi yaitu aktivitas sosialisasi dan pengarahan kebijakan agar program yang sudah direncanakan tepat dan dapat diterima serta dijalankan. Ketiga, aplikasi yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program yang nantinya menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut.

dari beberapa ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tahapan-tahapan yang

dilakukan menjadikan kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁷

Tujuan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan yang mengatur mengenai pendidikan sebenarnya sudah sangat banyak, hal ini seharusnya mempermudah perumusan serta ruang gerak bagi para praktisi pendidikan di Indonesia untuk lebih berinovasi dan memperbaiki sistem pendidikan agar sesuai dengan harapan pendidikan nasional. Banyaknya permintaan pada bab pembaharuan pendidikan di Indonesia yang dalam hal ini member pengaruh pada kebijakan Pendidikan yang telah mengalami banyak perubahan dan tentu erat kaitannya dengan tujuan dari implementasi kebijakan yang mengalami banyak perubahan pula.

Implementasi kebijakan memiliki tujuan untuk menentukan serta menetapkan arah dari realisasi tujuan kebijakan, dalam prosesnya implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan dari kebijakan telah ditentukan atau ditetapkan, program-program yang direncanakan sudah disahkan serta dana yang dialokasikan telah turun untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam penerapan tujuan implementasi kebijakan sebagai suatu proses interaksi antara tujuan dan Tindakan yang mampu meraih hal yang diinginkan. Penerapan dari kemampuan ini berguna untuk menciptakan hubungan lebih lanjut dalam serangkaian sebab akibat antara Tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang diharapkan.

Tujuan dari implementasi kebijakan perlu diaplikasikan sesuai dengan rencana pada prakteknya karena implementasi kebijakan tidak boleh hanya focus atau terbatas pada tingkah laku dari unit birokrasi yang bertanggung jawabkan tetapi dalam pelaksanaan program-programnya harus sesuai dengan target tujuan yang telah dibuat, akan tetapi yang lebih penting dari itu semua ialah kuatnya jaringan politik social ekonomi yang tentu memiliki pengaruh dalam perilaku semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan implementasi kebijakan Pendidikan. (Rasyidin, 2018) Pada tahap perumusan tujuan serta pembentukan kebijakannya perlu memperhatikan beberapa hal yang mungkin menjadi konsekuensi karena apabila suatu kebijakan yang dibuat dengan tidak tepat tentu akan berakhir dengan kegagalan dan ketidakberlakuan kebijakan tersebut. Bahkan mungkin, kebijakan yang telah dipersiapkan sedemikian rupa masih memiliki kemungkinan untuk gagal, semua itu kembali pada bagaimana pencipta kebijakan menentukan strategi dan cara yang efisien untuk pengaplikasian kebijakan. Selain dari itu, kebijakan yang berhasil tentu yang bisa di aplikasikan dengan sempurna atau dapat diterima oleh khalayak umum, kemudian yang dapat di ukur tingkat efektivitasnya dan kemudian dapat dilihat perubahan setelah diberlakukan kebijakan tersebut.⁸

faktor-faktor Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan

Pelaksanaan kebijakan pendidikan melibatkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesannya. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pendidikan :

7. Sumber Daya Manusia, Guru dan Tenaga Pendidik : Ketersediaan guru yang berkualitas dan terlatih dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pendidikan. Jumlah guru, kompetensi dan motivasi mereka dapat memainkan peran penting.

8. Sarana dan prasarana, Fasilitas Pendidikan : Ketersediaan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas yang memadai mendukung proses pembelajaran yang efektif.

9. Kurikulum dan materi pembelajaran, ketepatan kurikulum : Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan zaman. Materi pembelajaran yang relevan dan mendukung tujuan pendidikan.

10. Manajemen pendidikan, Kepemimpinan sekolah: Efektivitas kepemimpinan di tingkat sekolah dapat berpengaruh besar. Kepala sekolah yang efektif dapat mengarahkan pelaksanaan kebijakan dengan baik.

11. Partisipasi masyarakat, Peran orang tua : Tingkat keterlibatan orang tua dalam

pendidikan anak-anak mereka. Dukungan orang tua dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan.

12. Anggaran dan keuangan, Pendanaan pendidikan : Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan. Anggaran dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan fasilitas.

13. Evaluasi dan monitoring, Sistem evaluasi : Adanya sistem evaluasi dan monitoring yang baik untuk mengukur dampak kebijakan. Ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.

14. Teknologi pendidikan, Pemanfaatan teknologi : Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran dan administrasi pendidikan dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas kebijakan.

15. Kebijakan nasional dan regional, Kesesuaian dengan kebijakan tingkat tinggi : Kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebijakan nasional dan regional dapat memudahkan implementasinya.

16. Kondisi sosial ekonomi, Ketidaksetaraan sosial ekonomi : Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat memengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Kebijakan harus memperhatikan aspek ini.⁹

B. Peran Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kehadiran birokrasi sebenarnya dipergunakan untuk mengatur suatu pekerjaan yang beraneka ragam yang menyangkut kepentingan orang banyak agar bisa terlaksana dan melayani semua golongan dengan baik, efektif, dan mudah. Akan tetapi, dalam perkembangannya, sampai sekarang birokrasi telah menjadi momok bagi manusia modern, yang selalu ingin dihindari dan dijauhi.

Peran birokrasi dan partisipasi masyarakat sebagai kontrol pendidikan nasional merupakan fungsi birokrasi itu sendiri, mengontrol tugas pokok dan fungsi birokrasi pendidikan hingga pelaksanaan proses pendidikan di daerah supaya berjalan dengan baik. Menurut Tilaar, meningkatkan kemampuan kinerja birokrasi pendidikan dapat dilakukan melalui program pembinaan birokrasi pendidikan yang profesional, ini dilakukan untuk menghapus stigma bahwa birokrasi merupakan kelompok yang sangat sulit untuk berubah. Mereka cenderung menjadi orang yang konservatif dalam melaksanakan tugasnya.¹⁰

Dalam semua kegiatan implementasi kebijakan, menurut Charles O Jones selalu ada dua aktor yang terlibat didalamnya yaitu beberapa orang diluar para birokrat yang mungkin terlibat dalam aktifitas-aktifitas implementasi dan para birokrat sendiri yang terlibat dalam aktifitas fungsional, disamping tugas-tugas implementasi.

Dua pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan implementasi kebijakan pendidikan adalah pihak pertama merupakan para pengguna serta pihak-pihak yang tergabung dalam kelompok kepentingan. seperti para pengusaha, LSM, NU, Muhammadiyah, dan masih banyak lagi. Kelompok-kelompok ini pada umumnya berkepentingan terhadap proses implementasi kebijakan pendidikan agar tidak merugikan mereka.

Salah satu contoh konkrit adanya kepentingan beberapa kelompok tersebut adalah pada waktu implementasi Undang-undang No.2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yakni mereka berusaha mempengaruhi birokrasi pendidikan dalam hal perizinan, pengadaan bantuan buku, pengadaan bantuan laboratorium, pengangkatan guru, dan penilaian akreditasi sekolah. Adapun kepentingan bagi pengusaha dalam hal ini adalah diperolehnya lulusan-lulusan terbaik dari lembaga sekolah atau perguruan tinggi bagi perusahaannya.

Sedangkan pihak kedua yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah para pemimpin beserta staf birokrasi pendidikan. Mereka semua inilah pelaku riil dalam implementasi kebijakan pendidikan. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, birokrasi pendidikan membutuhkan perangkat organisasional dan sistem kerja yang baik agar ia bisa berperan baik sehingga bisa menghindari adanya masalah dan penyimpangan.

Beberapa penyebab timbulnya masalah dan penyimpangan adalah :

Adanya overlapping tujuan-tujuan kebijakan yang dihasilkan atau disebabkan oleh adanya kesalah-fahaman, kecacauan, atau disebabkan oleh konflik nilai. Untuk menjalankan peran fungsionalnya sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakan pendidikan sekaligus dalam rangka mengeliminasi adanya masalah dan penyimpangan sebagaimana disebut diatas, maka birokrasi pendidikan perlu melakukan upaya baru yang dalam ilmu sosial dikenal dengan istilah Model Implementasi Adaptif.

Model Implementasi Adaptif (MIA) adalah model penetapan suatu proses yang memungkinkan kebijakan dapat dimodifikasikan, di spesifikasikan, dan direvisi. MIA ini merupakan model yang muncul disebabkan oleh 4 faktor pendorong. sebagai berikut :

1. Beberapa kompleksitas personal dan birokrasi yang tidak dapat dihindarkan didalam proses implementasi dengan menekankan kepada batasan mengenai situasi yang dianggap sebagai variabel yang berguna dalam merencanakan strategi-strategi implementasi.
2. Studi-studi mengenai peranan kebijakan yang merubah organisasi, Studi mengenai cara dimana inovasi didapatkan kembali setelah memperkuat kepentingan adaptasi dari proses implementasi.
3. Pengaruh yang terus menerus dari para ahli teori organisasi yang mengevaluasi model-model organisasi yang bersifat hierarki, menekankan pada desentralisasi keflexibelan dan mempelajari organisasi adaptif.
4. Model Implementasi Adaptif sebagai salah satu hasil temuan para ahli ilmu sosial dalam mendorong agar kegiatan implementasi kebijakan pendidikan lebih berhasil, sebenarnya memiliki ciri-ciri yang melekat yaitu :

banyak menghindari prinsip-prinsip paradigma design-eksperimen. Dapat mengubah pokok-pokok pikiran yang ditetapkan sebelumnya, karena adanya orientasi dari para pendukung, misalnya treatment yang distandarkan untuk kelompok-kelompok yang menjadi target. Spesifikasi tujuan lebih merupakan "masalah" dari pada suatu "nilai". Sebaliknya perubahan dalam kebijakan organisasi yang diimplementasikan lebih merupakan suatu "nilai" dari pada suatu "masalah".

Penerapan dari model ini dalam implementasi kebijakan pendidikan, maka seorang pejabat birokrasi pendidikan lebih memiliki fleksibilitas dalam memahami aturan, sikap serta target-target sasaran yang dicapai.¹¹

Implementasi kebijakan dan peran birokrasi di bidang pendidikan dibutuhkan birokrasi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kinerja birokrasi melalui responabilitas harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan prima terutama merespon kepentingan publik. Lembaga pendidikan membutuhkan penghargaan dan perlakuan humanis ketimbang dijadikan sasaran eksploitasi dan kepentingan politis etis semata yang menegasikan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri.¹²

Kendala dalam implementasi birokrasi pendidikan

1. Kendala pada Lembaga Pendidikan

Kendala implementasi kurikulum merdeka yang dihadapi lembaga pendidikan dasar diantaranya adalah kurangnya kesiapan dan kapasitas guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Guru perlu memahami konsep dan metodologi kurikulum merdeka serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan tersebut. Selanjutnya kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya. Lembaga pendidikan mungkin mengalami keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun bahan ajar yang diperlukan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan baik. Keterbatasan ini dapat menghambat pengembangan pembelajaran yang beragam dan inovatif. Kendala pada kurangnya dukungan dan pemahaman dari Stakeholder. Kurangnya dukungan dan pemahaman dari berbagai pihak,

termasuk orang tua siswa, Masyarakat, dan pihak terkait lainnya, juga dapat menjadi kendala bagi Lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kurangnya pemahaman terkait konsep, tujuan, dan manfaat kurikulum merdeka dapat menghambat dukungan yang diperlukan untuk kesuksesan implementasi. Kendala pada penyesuaian dengan konteks lokal. Setiap lembaga pendidikan memiliki konteks dan karkter yang unik. Penyesuaian kurikulum merdeka dengan kebutuhan lokal, budaya, dan kondisi lingkungan tempat lembaga pendidikan berada dapat menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi.

2. Kendala yang dihadapi guru

Guru dihadapkan pada sejumlah kendala dalam impelentasi kurikulum merdeka. Berikut beberapa diantaranya: 1) Kurangnya pemahaman tentang konsep kurikulum merdeka: banyak guru mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam terkait dengan konsep dan prinsip kurikulum merdeka. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan yang diinginkan. 2) Keterbatasan sumber daya dan fasilitas: Guru seringkali mengalami kendala karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas di sekolah, seperti buku teks yang relevan, perangkat teknologi, dan ruang kelas yang memadai. Keterbatasan ini dapat menghambat pengembangan pembelajaran yang beragam dan inovatif. 3) Tantangan dalam penyusunan dengan kebutuhan siswa: Setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Guru mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan kurikulum dengan keberagaman karakteristik siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. 4) Kesulitan dalam penilaian: Implementasi kurikulum merdeka mungkin mengharuskan guru untuk menggunakan metode penilaian yang lebih beragam dan berbasis kompetensi. Guru perlu mengembangkan keterampilan dalam merancang dan menerapkan penilaian yang sesuai dengan pendekaann kurikulum yang baru. 5) Kurangnya dukungan dan pelatihan: Guru seringkali membutuhkan dukungan dan pelatihan yang memadai dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kurangnya pelatihan yang relevan dan dukungan dari pihak sekolah atau pemerintah dapat menjadi. Kendala dalam mengembangkan praktik pembelajaran yang efektif. 6) Tantangan dalam menyusun rencana pembelajaran yang relevan dengan kurikulum merdeka, yang mencakup penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan metode pengajaran, dan penilaian hasil belajar. Menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan kurikulum yang baru dapat menjadi tantangan tersendiri bagi Sebagian guru.

3. Kendala yang dihadapi siswa

Siswa ditingkat sekolah dasar juga dapat menghadapi sejumlah kendala dalam mengikuti implementasi Kurikulum merdeka. Berikut adalah beberapa kendala yang mungkin mereka alami:

- a. Kurangnya kesiapan dalam Menghadapierubahan: Siswa mungkin merasa tidak siap menghadapi perubahan dalam proses pembelajaran yang dibawa oleh kurikulum merdeka. Mereka terbiasa dengan pendekatan pembelajaran yang konvensional dan mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan siswa.
- b. Keterbatasan akses terhadap sumber belajar: Siswa dari daerah terpencil atau berstatus ekonomi rendah mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap sumber belajar yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam mengikuti pembelajaran dengan baik.
- c. Kesulitan dalam menyesuaikan gaya pembelajaran: Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Implementasi kurikulum merdeka yang menekankan pendekatan pembelajaran yang beragam mungkin membuat sebagian siswa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan gaya pembelajaran mereka dengan metode pembelajaran yang diterapkan.

- d. Tantangan dalam memahami tujuan pembelajaran yang lebih abstrak: Kurikulum merdeka mungkin menetapkan tujuan pembelajaran yang lebih abstrak atau bersifat holistik. Siswa mungkin mengalami kesulitan dalam memahami tujuan pembelajaran tersebut dan merasa kurang termotivasi dalam mencapainya.
- e. Kesulitan dalam menyeimbangkan antara kegiatan pembelajaran dan aktivitas lainnya: Siswa di tingkat sekolah dasar juga terlibat dalam berbagai aktivitas di luar lingkungan sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler dan keluarga. Implementasi kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran yang lebih aktif dan berbasis proyek mungkin membuat sebagian siswa mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara kegiatan pembelajaran dan aktivitas lainnya.
- f. Kurangnya dukungan dari orang tua dan lingkungan: Siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti implementasi kurikulum merdeka jika tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari orang tua dan lingkungan sekitar. Kurangnya pemahaman atau kesadaran dari orang tua dan masyarakat terkait dengan konsep dan tujuan kurikulum merdeka dapat menjadi kendala bagi siswa

KESIMPULAN

Birokrasi memiliki peran sentral dalam implementasi kebijakan pendidikan, karena menjadi struktur utama yang menjembatani antara perumusan kebijakan di tingkat pusat dan pelaksanaannya di lapangan. Sebagai pelaksana teknis, birokrasi bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan menjadi program-program konkret, memastikan distribusi sumber daya, serta mengawasi dan mengevaluasi proses pelaksanaan. Tanpa dukungan birokrasi yang efektif dan responsif, kebijakan pendidikan berisiko tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Peran birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan meliputi beberapa aspek penting. Pertama, birokrasi bertugas memastikan bahwa kebijakan diterjemahkan ke dalam pedoman teknis yang jelas, sehingga dapat dipahami dan dijalankan oleh para pelaksana di sekolah dan instansi terkait. Kedua, birokrasi bertanggung jawab dalam alokasi sumber daya seperti dana, tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan secara merata dan adil. Ketiga, birokrasi berperan sebagai pengawas dan evaluator, guna memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana dan standar mutu yang ditetapkan.

Namun, peran birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah kompleksitas struktur birokrasi yang berlapis-lapis, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan kecenderungan birokrasi yang prosedural dan tidak fleksibel. Hal ini seringkali menyebabkan keterlambatan, penyimpangan, bahkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad, Muh Khairul Luthfi, M Firdaus Oiwo, e M Nasor. «Pendekatan Max Weber: Birokrasi Serta Struktur Kekuasaan Dalam Organisasi Pendidikan Modern». *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, n. 2 (2023): 2134–45.
<https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/2536>.

Arnis Rachamadhani. «PERAN BIROKRASI DALAM IMPLEMENTASI

PENDIDIKAN NASIONAL». *At-Turots: Jurnal Pendidikan Islam* 2, n. 1 (2020): 1–10.

Iswandi, Pebiola Ramadhani, M Gusti Randa, e Nofrijon. «IMPLEMENTASI, PROSES KOMPLEKS, DAN FAKTOR-FAKTOR PELAKSANAAN KEBIJAKAN



PENDIDIKAN».

Jurnal Menata: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam STAI YAPTIP Pasaman Barat, 2021, 87–96. <http://jurnal.staiyaptip.ac.id/index.php/menata/article/view/272>.

N Azza, Fatih, Farid Setiawan, Rio Saputra, Ammaliah Tri Yuliatin, e Muhamad Ilham.

«Implementasi Kebijakan Pendidikan». *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 4 (2021): 362–65. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.

Ramadhanti, Rika. «POLITIK DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN». *Jurnal Trias Politika* 2, n. 1 (2018): 96–104.

Solichin, Mujianto. «Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi». *Jurnal Studi Islam* 6, n. 2 (2015): 148–78.

Surur, Midkholus. «Birokrasi Weberian: “Proportional Approach”». *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 11, n. 2 (2019): 86–104.

Yuliah, Elih. «Implementasi Kebijakan Pendidikan». *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan* 30, n. 2 (2020): 129–53. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>.